

ALASAN CATALUNYA BERUPAYA MEMISAHKAN DIRI DARI SPANYOL

Annisa¹
1402045021

Abstract

Spain is well known as a diversity country with many different cultures and languages in its autonomous communities. Diversity itself can create disunity among country's citizen and lead into a secession movement. The purpose of this research is to describe and explain the reasons for Catalonia an attempt to secede from Spain using Secession concept. The method used in this study is explanative. Data collection method used literature study and secondary data. The data analysis method used is qualitative analytic. The result showed that the reasons of Catalonia attempt to secede from Spain was the first, because of the difference between Catalonia and Spain's identities that created Catalan Nationalism. The second reason is economy injustice that felt by Catalonia caused by Spain's Tax Policy. The third reason is an autonomy failure that happened in Catalonia since 2010 when Constitutional Court of Spain decided to amend Catalonia's Autonomy Law and restrict Catalonia's autonomy rights related to Catalonia's taxation.

Keywords : *Catalonia, Spain, Secession.*

Pendahuluan

Catalunya merupakan salah satu dari 17 wilayah otonom yang ada di Spanyol. Sebagai wilayah otonom, Catalunya berhak memiliki presiden, parlemen, pengadilan hingga benderanya sendiri. Wilayah otonom ini merupakan salah satu yang termaju dengan total GDP 262.388 juta dollar (18,6%) sedangkan Madrid berada di bawahnya dengan total GDP 252.407 juta dollar (17,6%) diikuti wilayah lain di Spanyol. (<http://web.gencat.cat/en/temes/catalunya>). Catalunya memiliki budaya dan bahasa yang cukup berbeda dari Spanyol. Wilayah ini menggunakan bahasa Catalan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Catalan digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah daripada bahasa Spanyol.

Pada tahun 2005, parlemen Catalunya mengajukan rancangan perubahan UU Otonomi Catalunya dengan menambah dan mengubah beberapa pasal termasuk paragraf pembuka. Rancangan ini disetujui oleh hampir seluruh anggota parlemen kecuali oleh partai nasionalis Spanyol, *Partido Popular* yang justru mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi Spanyol mengenai beberapa artikel termasuk paragraf pembuka yang menyebutkan Catalunya sebagai sebuah bangsa. Akhirnya pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Spanyol mengubah beberapa artikel dan menyatakan bahwa Catalunya tidak bisa dianggap sebagai sebuah bangsa. Keputusan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annisaacn@gmail.com

tersebut disahkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 31 tahun 2010. Sejak adanya perubahan tersebut Hari Nasional Catalunya yang diperingati setiap tanggal 11 September berubah menjadi hari pro kemerdekaan. Pada tanggal 11 September 2012, hampir 2 juta warga Catalunya turun ke jalan untuk mengikuti *long-march* menyuarkan kemerdekaan Catalunya dari Spanyol. (<https://www.theguardian.com>).

Fenomena pemisahan diri di Spanyol telah ada di beberapa wilayah otonom lain selain di Catalunya. Wilayah otonom seperti Basque Country dan Galicia merupakan dua wilayah otonom yang juga memiliki gerakan pemisahan diri dan kaum nasionalis di dalamnya. Basque Country mulai berupaya memisahkan diri sejak 1959-1979 dan dilanjutkan pada tahun 2000-2009 dengan upaya militer dan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi nasionalis *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA) atau yang berarti *Basque Homeland and Liberty*. Sama seperti Catalunya, Basque juga merasa bahwa mereka memiliki perbedaan identitas dengan Spanyol dan memiliki nasionalisme yang tinggi.

Upaya ETA ini gagal memberikan Basque Country kemerdekaan dan mereka berhenti beroperasi pada tahun 2011. Wilayah otonom lain yaitu Galicia yang berupaya memisahkan diri dari Spanyol karena merasa memiliki lebih banyak persamaan dengan Portugal, meskipun sebagian penduduk yang lain juga merasa Galicia lebih baik menjadi negara sendiri. Tidak seperti Catalunya dan Basque Country, Galicia bukan merupakan wilayah otonom yang maju, mereka justru hanya wilayah pertanian yang kurang berkembang. Meskipun begitu gerakan pemisahan diri sudah ada sejak tahun 1930-an dimana Galicia mendeklarasikan Republik Galicia pada tahun 1931 namun sama seperti Catalunya, Galicia akhirnya kembali ke Spanyol. *Bloque Nacionalista Galego* (BNG) merupakan organisasi yang paling aktif menyuarkan kemerdekaan Galicia sejak tahun 1985.

Presiden Catalunya Artur Mas mengumumkan akan mengadakan referendum di Catalunya pada 11 September 2014. Hasil dari referendum menunjukkan 91,80 % dari total 2.305.290 pemilih setuju Catalunya melepaskan diri dari Spanyol. (Rizky Abdillah Isma, 2015). Hasil referendum tersebut ditolak oleh pemerintah Spanyol dan dianggap sebagai referendum ilegal karena tidak pernah mendapat persetujuan dari pemerintah Spanyol. Penolakan pemerintah Spanyol terhadap hasil referendum ini juga didukung oleh UUD tahun 1978 pasal 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan Spanyol merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Spanyol.

Catalunya mengupayakan agar diadakannya referendum kembali. Artur Mas digantikan oleh Carles Puigdemont. Catalunya kembali mengadakan referendum pada 01 Oktober 2017. Hasil dari referendum tersebut menunjukkan bahwa dari 2.044.038 pemilih, sebanyak 92,01% setuju agar Catalunya menjadi negara merdeka. (<https://www.theguardian.com>). Akhirnya pada 27 Oktober 2017 Carles Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya secara sepihak sebagai negara republik yang terlepas dari Spanyol.

Terlepasnya Catalunya dari Spanyol tidak hanya akan membawa dampak yang besar terhadap Spanyol tetapi juga terhadap Catalunya. Uni Eropa mengatakan bahwa apabila Catalunya mendirikan negara mereka sendiri, maka secara otomatis juga akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa dan harus mendapatkan persetujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk bisa menjadi anggota. Hal ini dipandang sulit untuk dilakukan mengingat bahwa negara-negara anggota UE merupakan aliansi Spanyol yang tentu saja akan menyulitkan jalan Catalunya untuk berhasil menjadi anggota. (<http://www.businessinsider.com>).

Apabila Catalunya tidak menjadi anggota UE, maka akan berdampak terhadap perekonomian wilayah tersebut karena 65.8 % ekspor Catalunya tertuju ke negara-negara anggota UE. Menteri Ekonomi Spanyol juga mengatakan bahwa perekonomian Catalunya akan menurun hingga 20-30 % dan menyebabkan jumlah pengangguran akan dua kali lipat lebih banyak apabila Catalunya terpisah dari Spanyol. (<https://www.cnbc.com>). Spanyol dan sebagian besar negara-negara di dunia juga tidak mengakui kemerdekaan Catalunya, namun Catalunya tetap menyuarakan tuntutan kemerdekaannya.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Kerangka konseptual ini akan menjelaskan tentang alasan Catalunya yang berupaya memisahkan diri dari Spanyol dengan menggunakan teori atau konsep *Secession* yang dapat dikolerasikan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Konsep Secession

Secession secara etimologi berarti berunding, sedangkan *secession* dalam bahasa Indonesia berarti pemisahan diri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *secession* diartikan sebagai tindakan memisahkan diri dari persekutuan atau asosiasi dengan orang lain, seperti dalam sebuah organisasi keagamaan atau politik. Istilah *secession* merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu kelompok dalam sebuah negara yang ingin mendirikan negara mereka sendiri atau berpisah dari negara asalnya. Menurut Pavkovi dan Radan dalam bukunya yang berjudul *The Ashgate Research to Companion Secession* menyebutkan bahwa *secession* merupakan proses dimana sebuah kelompok menarik diri dari wilayah dan kependudukannya untuk mendirikan negara baru di wilayah tersebut. (Aleksander Pavkovi, Peter Radan. 2011) *Secession* sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1) Perbedaan Identitas

Perbedaan identitas menjadi pondasi untuk wilayah tersebut memisahkan diri dari suatu negara yang tidak memiliki identitas yang sama dengan mereka. Perbedaan identitas tersebut dapat terbangun akibat adanya perbedaan sejarah di antara kedua wilayah, dimana suatu wilayah merasa adanya perbedaan nyata antara mereka dengan sebagian besar penduduk negara asalnya. Perbedaan sejarah ini nantinya akan membentuk budaya dan norma yang berbeda. Menurut Jason Sorens, identitas etnis dan wilayah merupakan kunci utama terjadinya pemisahan diri suatu kelompok dari negara asalnya. (Jason Sorens. 2012)

2) Ketidakstabilan Ekonomi

Milica Bookman sebutkan dalam bukunya yang berjudul *The Economics of Secession*, bahwa kekuatan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan sebuah kelompok untuk melakukan *secession*. Jason Sorens juga mengatakan bahwa wilayah yang membawa keuntungan ekonomi bagi negara asalnya akan lebih besar peluangnya untuk memisahkan diri dibandingkan dengan wilayah yang lebih lemah perekonomiannya. Hal ini bisa terjadi karena wilayah yang memiliki ekonomi lebih kuat akan memilih untuk mengelola perekonomiannya sendiri terutama apabila negara asalnya mengalami penurunan ekonomi. Dengan mengelola ekonominya sendiri wilayah tersebut berharap akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga memilih untuk menjadi negara independen dan tidak terikat dengan negara asalnya.

3) Kegagalan Otonomi

Jason Sorens melanjutkan bahwa selain ekonomi, *secession* juga bisa disebabkan oleh kebijakan otonomi yang pemerintah pusat terapkan di wilayah tertentu. Wilayah dengan kekuatan ekonomi yang kuat juga akan cenderung menuntut hak otonomi yang lebih besar dan merasa tidak cukup puas dengan kebijakan otonomi yang ada karena tidak cukup menguntungkan bagi mereka. Dengan menjadi sebuah negara maka wilayah tersebut dapat menentukan kebijakan mereka sendiri tanpa harus berharap pada keputusan pemerintah pusat.

Menurut Glen Anderson, *secession* dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu *Constitutional Secession*, *Politically Negotiated Secession* dan *Unilateral Secession*.

1) *Constitutional Secession*

Jenis *secession* ini merupakan jenis *secession* yang dicapai melalui proses damai dan tanpa pemaksaan ataupun kekerasan. *Constitutional Secession* terjadi saat sebuah negara berdaulat mengizinkan salah satu wilayah mereka untuk memisahkan diri. Negara berdaulat tersebut bahkan akan memberikan payung hukum terhadap upaya *secession* agar *secession* tersebut menjadi legal dan wilayah yang nantinya akan memisahkan diri dapat lebih mudah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Contohnya yang terjadi di negara Kanada, hukum negara tersebut memungkinkan wilayah mereka untuk melepaskan diri, hal ini telah terjadi pada provinsi Quebec yang memisahkan diri dari Kanada.

Selain Kanada, ada beberapa negara lain yang juga menyediakan landasan hukum di negara mereka mengenai *secession*, antara lain *1921 Liechtenstein Constitution*, *1931 Chinese Constitution*, *1947 Constitution of Union Burma*, *1984 Saint Christopher and Nevis Constitution* dan *1994 Ethiopian Constitution*.

2) *Politically Negotiated Secession*

Secession ini juga terjadi tanpa ada perlawanan atau penggunaan kekerasan karena upaya untuk memisahkan diri dilakukan dengan negosiasi antara wilayah yang ingin merdeka dengan negara asal mereka. *Secession* ini biasanya terjadi akibat adanya kegagalan negara tersebut dalam mengelola wilayah tersebut sehingga memunculkan keinginan untuk memisahkan diri.

Politically Negotiated Secession ini telah terjadi di banyak wilayah seperti saat Norwegia menegosiasikan pemisahan diri dengan *Union of Sweden and Norway*

tahun 1905, Islandia yang memisahkan diri dari Denmark tahun 1918, Suriah memisahkan diri dari *United Arab Republic* tahun 1960, dan Singapura yang memisahkan diri dari Malaysia tahun 1965.

3) *Unilateral Secession*

Unilateral Secession merupakan tipe *secession* yang melibatkan unsur perlawanan dan kekerasan karena upaya *secession* yang dilakukan tidak mendapat persetujuan dari negara asalnya. Hal ini biasanya terjadi karena negara tersebut tidak memiliki landasan hukum mengenai *secession* dan tidak berniat untuk membuatnya.

Karena tidak adanya landasan hukum mengenai pemisahan diri di negara mereka maka wilayah yang ingin memisahkan diri tersebut berpaku pada prinsip hukum internasional mengenai konsep *self-determination*, yang telah diterapkan di *UN Charter*, *Declaration on the Granting of Independence from Colonial Countries and Peoples*, *International Covenant of Economics, Social and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Politic Rights*. Contoh negara yang berhasil melakukan *unilateral secession* antara lain Indonesia dari Belanda, Vietnam dari Perancis, Sudan Selatan dari Sudan, Bangladesh dari Pakistan, Guinea-Bissau dari Portugal dan Algeria dari Perancis.

Tidak banyak kelompok *secession* yang dapat meraih kesuksesan memisahkan diri dari negara asal mereka. *Secession* tidak begitu mendapat persetujuan dari dunia internasional karena konsep ini sendiri berlawanan dengan konsep kedaulatan negara yang menjadi tujuan setiap negara merdeka. *Secession* kerap dipandang negatif dan erat kaitannya dengan kericuhan, kekerasan, dan instabilitas. Sulitnya mendapatkan pengakuan dari negara lain adalah salah satu hambatan suatu wilayah untuk memisahkan diri dari negara asal mereka.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dimana penulis menjelaskan apakah alasan Catalunya berupaya memisahkan diri dari Spanyol. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif *content analysis*, yaitu penulis menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang penulis teliti.

Hasil Penelitian

Sejarah Hubungan Spanyol-Catalunya

Wilayah Spanyol dibagi menjadi 17 wilayah otonom yang terdiri dari 50 provinsi serta 2 kota otonom tambahan. Wilayah otonom Catalunya yang memiliki wilayah yang hanya sebesar 32.114 km² namun memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yaitu sebanyak 7.522.596 jiwa. Wilayah Catalunya tersebut terdiri dari empat provinsi yaitu provinsi Barcelona, Girona, Tarragona dan Lleida. Sebagai salah satu wilayah otonom di Spanyol, Catalunya diberikan hak untuk memiliki presiden, parlemen, pengadilan hingga benderanya sendiri, selain itu juga Catalunya diperbolehkan menggunakan bahasa lokalnya yaitu bahasa Catalan. Catalunya

menjadi bagian dari Spanyol sejak tahun 1469 dan menjadi satu kesatuan yang membentuk Kerajaan Spanyol.

Pada tahun 1469 Raja Ferdinand dari Aragon (Catalunya) menikah dengan Ratu Isabel dari Castille (Spanyol) dan memulai sejarah awal pembentukan Kerajaan Spanyol serta mengakhiri kekuasaan Muslim yang telah berlangsung hampir 800 tahun di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Ferdinand dan Isabel, Spanyol memulai kegiatan penaklukan dan eksplorasi. Ferdinand dan Isabel mulai menggunakan nama *España* atau yang berarti Spanyol untuk menamakan kerajaan mereka namun tetap menjalankan pemerintahan yang terpisah di Aragon dan Castille. Kegiatan eksplorasi Spanyol ini membuatnya menjadi salah satu kerajaan yang sangat kuat di dunia saat itu.

Namun kejayaan Kerajaan Spanyol berangsur-angsur mundur di akhir abad ke 18. Kemunduran Spanyol diikuti dengan kematian Raja Charles II tahun 1700 yang tidak memiliki keturunan dan memicu pecahnya Perang Suksesi Spanyol tahun 1701 – 1714 untuk memperebutkan takhta kekuasaan Spanyol. Catalunya berperan sebagai pendukung Austria, namun perang tersebut dimenangkan oleh Philip V dari Perancis. Pasukan dari Catalunya menyerah pada tanggal 11 September 1714 dan tanggal tersebut menjadi peringatan Hari Nasional Catalunya setiap tahun.

Selanjutnya Catalunya menjadi salah satu wilayah yang seringkali dilarang menggunakan bahasa daerahnya antara lain saat pemerintahan Raja Philip V, Miguel Primo de Rivera, dan Francisco Franco. Setelah Francisco Franco meninggal, Catalunya kembali diperbolehkan menggunakan bahasa daerahnya. Sejak saat itu Catalunya diberikan hak otonomi tahun 1978 oleh Raja Juan Carlos I.

Politik dan Pemerintahan Spanyol

Spanyol menganut sistem pemerintahan Monarki Parleментар sehingga kepala negara dijabat oleh Raja dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri. Spanyol dipimpin oleh Raja Felipe VI dan Perdana Menteri Mariano Rajoy. Raja Felipe VI merupakan anak ketiga dan putra satu-satunya Raja Juan Carlos I dan Ratu Sophia. Di usia ke 46, Raja Felipe VI naik takhta pada 19 Juni 2014 setelah abdikasi ayahnya dan menjadi Raja termuda dalam sejarah Kerajaan Spanyol.

Posisi Perdana Menteri dijabat oleh Mariano Rajoy yang merupakan politikus dari Partai *Partido Popular* dan menjadi Perdana Menteri sejak 21 Desember 2011. Sedangkan Cabang legislatif diisi oleh Parlemen Spanyol atau yang juga disebut *Cortes Generales* yang merupakan badan legislatif bikameral yang terdiri dari Kongres Deputi (Majelis Rendah) dan Senat (Majelis Tinggi). Kongres Deputi terdiri dari 350 anggota yang mewakili 52 kota dimana saat ini didominasi oleh *Partido Popular* (PP) dengan 135 kursi dan *Partido Socialista Obrero Espanol* (PSOE) dengan 84 kursi (<https://www.rogerdarlington.me.uk/Spanishpoliticalsystem>).

Hubungan Pemerintah Pusat-Wilayah Otonom

Wilayah otonom dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan otonomi yaitu mencapai persatuan dalam keberagaman; menyelenggarakan otonomi tetapi bukan kedaulatan wilayah; dan menciptakan solidaritas di antara seluruh wilayah. Setiap wilayah memiliki UU Otonomi yang merupakan dasar pembentukan wilayah otonomi yang diakui oleh Konstitusi Spanyol 1978 dan disetujui oleh parlemen. Hubungan pemerintah Spanyol dengan pemerintah wilayah otonom didasari oleh Konstitusi Spanyol 1978 artikel ke-2.

Hubungan politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah otonomi Catalunya memburuk sejak wilayah tersebut mengadakan Referendum Kemerdekaan pada 9 November 2014 dan 1 Oktober 2017, politik Catalunya mengalami krisis konstitusi yang menyebabkan PM Mariano Rajoy membubarkan parlemen Catalunya dan mencabut jabatan kepala pemerintahan pada tanggal 28 Oktober 2017. Pencabutan dan pembubaran ini menyebabkan Catalunya menjadi wilayah otonom tanpa parlemen dan presiden dan diambil alih langsung oleh pemerintah pusat selama tujuh bulan. Sebelumnya jabatan Presiden Catalunya diduduki oleh Carles Puigdemont sejak 10 Januari 2016 menggantikan pendahulunya Arthur Mas. Pada tahun 2018 Carles Puigdemont digantikan oleh Quim Torra.

Selain mengatur hubungan politik, Konstitusi juga mengatur hubungan ekonomi. Spanyol memberlakukan kebijakan pajak dimana wilayah yang lebih kaya berperan sebagai distributor keuntungan sedangkan wilayah yang lebih miskin sebagai resipien. Wilayah distributor terbesar antara lain adalah Madrid, Catalunya dan Andalusia. Distribusi pajak diatur oleh pemerintah pusat yang juga berhak menentukan seberapa besar setiap wilayah dapatkan menurut luas wilayah, jumlah populasi, jumlah kemiskinan dan tekanan fiskal. Kebijakan ini menjadi salah satu isu utama pada perubahan UU Otonomi Catalunya tahun 2006 (<https://www.nytimes.com/2012/09/14/world/europe/14iht-catalonia14.html>).

Upaya Catalunya Memisahkan Diri Dari Spanyol (1640-2017)

Sejak saat bergabung dengan Spanyol, Catalunya telah beberapa kali berupaya memisahkan diri dari negara tersebut. Upaya pertama terjadi saat pecahnya Perang Reaper antara penduduk Catalunya dengan monarki Spanyol tahun 1640-1659. Perang ini menandai pertama kalinya Catalunya berperang melawan monarki Spanyol. Namun Catalunya dipimpin oleh Pau Claris dibantu oleh Perancis yang dipimpin oleh Kardinal Richelieu kalah melawan kekuatan Spanyol.

Dilanjutkan dengan pendirian Republik Catalunya oleh partai koalisi *Esquerra Republicana de Catalunya* tahun 1931. Upaya kali ini dijalankan dengan lebih politis karena Catalunya mulai berperan dalam politik dan membangun partai-partai nasionalis Catalunya. Meskipun sempat berhasil mendirikan Republik Catalunya pada 14 April 1931, Catalunya memutuskan untuk kembali ke dalam pemerintahan Spanyol setelah dijadikan wilayah otonom pada tahun yang sama.

Catalunya kembali berupaya berpisah pada tahun 2010 yang ditandai dengan diadakannya demonstrasi kemerdekaan di Barcelona. Demonstrasi ini rutin dilakukan hingga tahun 2017 yang menyebabkan Catalunya mengadakan dua kali referendum kemerdekaan yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2017. Pada hari

pemungutan suara 1 Oktober 2017, satuan kepolisian dituduh telah melakukan kekerasan terhadap beberapa pemilih dan menghancurkan peralatan hingga menyebabkan kerusakan di beberapa TPU. Beberapa foto dan video kekerasan diviralkan di dunia maya sebagai bukti kejadian tersebut. Pemerintah pusat pun menarik keluar petugas kepolisian setelah mendengar kabar tersebut. Hasil referendum tersebut ditolak oleh pemerintah Spanyol serta memperburuk hubungan Catalunya dengan Spanyol. Meskipun mendapat penolakan, pemerintah Catalunya yang dipimpin oleh Carles Puigdemont tetap mendeklarasikan kemerdekaannya pada 27 Oktober 2017.

Deklarasi ini menyebabkan pemerintah Spanyol mengambil alih pemerintahan Catalunya dengan menerapkan Artikel 155 Konstitusi Spanyol dan mencabut jabatan seluruh parlemen serta presiden Catalunya. Pemerintah Spanyol mengadakan pemilu untuk membentuk parlemen baru. Parlemen dan presiden Carles Puigdemont dijatuhi hukuman namun mereka melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuntutan. Pada tahun 2018 jabatan presiden diduduki oleh Quim Torra yang juga mendukung Catalunya untuk merdeka.

Upaya Catalunya dalam memisahkan diri dari Spanyol disebabkan oleh alasan yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu adanya nasionalisme Catalan, kebijakan pajak Spanyol di Catalunya dan perubahan UU Otonomi Catalunya 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol tahun 2010.

Alasan Catalunya Berupaya Memisahkan Diri Dari Spanyol

1. Nasionalisme Catalan

Nasionalisme Catalan merupakan gagasan yang berkembang di antara penduduk Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol dan mendirikan negara mereka sendiri akibat adanya perbedaan identitas antara penduduk Catalunya dan Spanyol serta hubungan buruk yang telah terjalin lama diantara keduanya. Selain itu nasionalisme juga berkembang karena kekuatan Catalunya dari sisi ekonomi, dimana Catalunya telah sejak lama memiliki kekuatan ekonomi yang berpengaruh di Spanyol.

Nasionalisme Catalan pertama kali dikenalkan oleh Francesc Pi i Margall dalam tulisannya *The Nationalities* yang terbit pada tahun 1877 di Catalunya. Di dalam tulisannya, Margall tidak hanya menulis mengenai nasionalisme Catalan namun juga tentang nasionalisme wilayah lain di Spanyol seperti di Basque Country. Margall menulis bahwa Spanyol harus menjadi sebuah negara federal yang mengakui keberagaman dan perbedaan identitas wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Tulisan Margall menginspirasi ide nasionalisme Catalunya saat itu.

Valenti Almirall merupakan salah satu penulis sekaligus politisi Catalunya yang terinspirasi dengan tulisan Margall. Ia pun mendirikan surat kabar *El Diari Catala* tahun 1879 dan majalah *L'Avens* tahun 1880 yang merupakan surat kabar dan majalah pertama yang menggunakan bahasa Catalan. Selanjutnya tahun 1881 ia mengadakan Kongres Catalunya yang menghasilkan kesepakatan untuk didirikannya sebuah akademi untuk mengajarkan tata bahasa Catalan serta pendirian organisasi politik *Centre Catala*.(Simon Harris, 2011). Organisasi

Centre Catala selanjutnya mengadakan Kongres Catalunya kedua tahun 1883. Inti dari kongres tersebut adalah untuk menolak segala bentuk keanggotaan partai nasionalis Spanyol di Catalunya dan akan lebih fokus membahas isu-isu yang terjadi Catalunya. Tahun 1886 Almirall juga menulis *Lo Catalanisme* yang menjadi tulisan tentang nasionalisme Catalunya berikutnya setelah *The Nationalities* milik Margall. Almirall dan Margall merupakan tokoh nasionalisme Catalan yang sangat berperan dalam membangun nasionalitas Catalunya pada abad ke-19.

Pada abad ke-20, nasionalisme Catalunya memasuki era politik yang lebih modern. Kemajuan politik Catalunya juga disebabkan oleh kegagalan Spanyol dalam mempertahankan daerah koloninya di Kuba, Puerto Rico dan Filipina pada tahun 1898. Kuba merupakan salah satu wilayah yang sangat penting bagi industri perdagangan Catalunya. Modernitas politik Catalunya ditandai dengan didirikannya partai *Lliga Regionalista* tahun 1901 yang dipimpin oleh Franscec Cambo. Salah satu pencapaian terbesar *Lliga Regionalista* adalah dengan didirikannya Persemakmuran Catalunya yang merupakan penggabungan 3 wilayah di luar Barcelona yaitu Girona, Tarragona dan Lleida. Persemakmuran mengembangkan teknologi yang cukup penting di daerah mereka seperti jalan raya dan telepon. Selain itu juga mengembangkan budaya dan bahasa lokal Catalunya. Persemakmuran ini membuat kekuatan politik Catalunya semakin besar dengan wilayah yang juga semakin luas. Partai lain juga ikut berdiri seperti *Accio Catalana* dan *Estat Catala* tahun 1922. Tidak seperti *Lliga Regionalista*, kedua partai ini lebih aktif dalam menyuarakan ide kemerdekaan, terutama setelah Miguel Primo de Rivera naik menjadi Perdana Menteri Spanyol tahun 1925 dan membubarkan persemakmuran.

Persemakmuran ini menjadi langkah awal kekuatan kaum nasionalis Catalunya yang resmi berdiri di bawah monarki Spanyol tahun 1913. Namun persemakmuran ini akhirnya dibubarkan setelah Miguel Primo de Rivera naik menjadi Perdana Menteri di Spanyol tahun 1925. Setelah Primo de Rivera turun dari jabatannya pada tahun 1930, upaya pemisahan diri Catalunya dimulai kembali ditandai dengan penyatuan partai pro-independen yang dipimpin partai *Estat Catala* lalu mendirikan partai Republik Kiri Catalunya yang dipimpin oleh Franscec Macia i Llussa.

Nasionalisme Catalan semakin dikenal saat Franscec Macia beserta partai koalisinya berhasil mendirikan Republik Catalunya pada 14 April 1931. Spanyol dengan cepat merespon pendirian republik tersebut karena tidak ingin kehilangan Catalunya. Pada hari yang sama, pemerintah Spanyol langsung mengirimkan tiga menteri ke Barcelona untuk mengadakan diskusi dengan Macia. Pada 17 April 1931, Republik Catalunya resmi dibubarkan dan kembali ke dalam wilayah kekuasaan Spanyol. Catalunya mulai membangun hubungan baik dengan pemerintah Spanyol setelah diberikan hak otonomi. Namun hal ini tidak bertahan lama karena budaya dan bahasa Catalunya harus sekali lagi mengalami penindasan saat diktator Francisco Franco memimpin Spanyol pada tahun 1939-1978. Catalunya kembali diperbolehkan menggunakan bahasa lokalnya setelah Spanyol dipimpin oleh Raja Juan Carlos I tahun 1979.

Bahasa Catalan semakin diperkenalkan dengan didirikannya stasiun televisi TV3 dan Canal 33 tahun 1989 yang menggunakan bahasa Catalan. Hal ini juga dilakukan di beberapa radio di Catalunya. Pada tahun 1992, Catalunya juga berupaya untuk memperkenalkan bahasa Catalan di Olimpiade 1992 dimana Barcelona menjadi tuan rumah. Pada Olimpiade 1992 ini juga ditampilkan secara internasional spanduk bertuliskan “*Catalonia is Not Spain*”. Kesuksesan Barcelona dalam menjalankan Olimpiade 1992 membuat kota tersebut jauh lebih terkenal dari Madrid.

Bahasa Catalan sendiri semakin dikembangkan di Catalunya setelah pemerintahan Francisco Franco selesai. Selain digunakan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Catalan juga digunakan sebagai bahasa pengantar di institusi pemerintahan, pengadilan, sekolah-sekolah, dan perusahaan-perusahaan. Film dan program televisi asing seperti dari 20th Century Fox, HBO dan Netflix bekerjasama dengan pemerintah Catalunya untuk melakukan *dubbing* dalam bahasa Catalan di produk film mereka. (Anastazia Merinzel, 2014). Kekuatan bahasa Catalan telah membentuk nasionalisme masyarakat Catalunya meningkat dan menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan sehingga menjadi salah satu alasan Catalunya untuk melepaskan diri dari Spanyol.

Apabila dilihat dari konsep *Secession* dimana disebutkan bahwa alasan suatu wilayah berupaya melepaskan diri dari negara asalnya adalah adanya perbedaan identitas. Identitas Catalunya yang berbeda dari Spanyol dapat dilihat dari adanya nasionalisme lokal yang tumbuh akibat perbedaan bahasa yang digunakan dan budaya yang mereka terapkan di Catalunya. Tidak hanya bahasa, namun budaya nasional yang sangat terkenal di Spanyol seperti *bullring* dilarang diadakan di Catalunya.

2. Kebijakan Pajak Spanyol

Spanyol memberlakukan kebijakan pajak dimana wilayah yang lebih kaya berperan sebagai distributor keuntungan sedangkan wilayah yang lebih miskin sebagai resipien. Kekuatan ekonomi Catalunya menjadi salah satu alasan mengapa wilayah tersebut menjadi wilayah distributor dalam kebijakan pajak di Spanyol. Bersama dengan wilayah otonom maju lainnya seperti Madrid, Andalusia, Valencia, dan Basque Country, wilayah Catalunya berperan sebagai distributor keuntungan. Dalam kebijakan tersebut jumlah pajak yang dibayarkan oleh setiap wilayah otonom ditentukan melalui jumlah PDB setiap tahun, jumlah populasi, jumlah kemiskinan, dan tingkat tekanan fiskal. Penentuan pajak ini diatur oleh *Agencia Estatal de Administracion Tributaria* (AEAT) yang bertanggungjawab atas semua kegiatan perpajakan di tingkat nasional maupun regional. Agensi ini juga yang berhak menentukan berapa banyak dari jumlah pajak yang harus dibayar dan berapa banyak jumlah yang akan mereka terima kembali.

Kekuatan ekonomi ini juga yang menjadi alasan tingginya pajak yang harus dibayarkan Catalunya kepada pemerintah pusat di Madrid untuk diteruskan ke wilayah-wilayah otonomi lain di Spanyol. Menteri Keuangan Spanyol mengaku bahwa Catalunya setiap tahun membayar sekitar 6,38% hingga 8,70% dari total

PDB-nya (tergantung jumlah PDB setiap tahun) yang disalurkan ke wilayah lain di Spanyol. Hal tersebut berarti bahwa Catalunya menyumbang sebanyak 13-17 juta euro setiap tahunnya untuk pembayaran pembangunan investasi dan infrastruktur di seluruh wilayah Spanyol. Tahun 2009, sekitar 43% dari total yang dibayarkan Catalunya dihabiskan untuk keperluan di luar wilayah mereka sendiri contohnya di Extremadura yang memiliki jumlah PDB cukup rendah dan merupakan wilayah otonom yang paling banyak mendapat subsidi pemerintah. (<https://countryeconomy.com>).

Menurut Menteri Keuangan Catalunya, sejak tahun 1986 hingga 2010 Catalunya membayar sekitar 8% dari total PDB mereka, jumlah ini ia bandingkan setara dengan total 6 kali pembangunan Marshall Plan. Data ini juga menunjukkan bahwa selama kurun waktu 25 tahun, Catalunya telah membayar pajak sekitar 400 juta euro. (<http://www.catalannews.com>). Hal ini menyebabkan Catalunya mengalami defisit fiskal, yaitu perbedaan antara jumlah yang Catalunya bayarkan ke Spanyol dengan jumlah yang Catalunya dapatkan kembali dari Spanyol.

Defisit ini mempengaruhi pembangunan di Catalunya sehingga untuk mengatasinya Catalunya memiliki hutang yang menumpuk dan memperburuk ekonominya sebagai salah satu wilayah termaju di Spanyol. Investasi Spanyol yang rendah di Catalunya menghambat pembangunan utama di wilayah tersebut antara lain *Mediterranean Railway Corridor* dan *Barcelona's Short-Distance Train Network*. Parlemen Catalunya akhirnya mengajukan permohonan untuk mengumpulkan pajak mereka sendiri, seperti yang sudah dilakukan oleh Basque Country dan Navarra. Parlemen Catalunya mengadakan rapat tertutup pada Parlemen Catalunya beranggapan bahwa ekonomi Catalunya tidak hanya diperburuk oleh Krisis Ekonomi Spanyol namun juga oleh kebijakan pajak nasional yang harus mereka ikuti.

Permohonan Catalunya ini mendapat respon dari wilayah otonom lainnya yaitu Extremadura yang merupakan wilayah otonom yang menjadi penerima subsidi pemerintah. Menurut pemerintah Extremadura, Catalunya merupakan wilayah otonom yang cukup spesial karena per tahunnya mereka menerima 4.340,89 euro/jiwa, diikuti oleh Valencia sebesar 3.273,43 euro/jiwa, dan Kepulauan Balearic sebesar 3.161 euro/jiwa sedangkan Extremadura berada di posisi ke-10 dengan 2.605,73 euro/jiwa. Extremadura juga mengatakan bahwa Catalunya memiliki banyak keunggulan dimana jutaan penduduk dari luar Catalunya datang ke sana hanya untuk mencari pekerjaan sehingga wilayah otonom tersebut dipenuhi oleh kaum pekerja. Extremadura juga mengatakan bahwa mereka tidak ingin subsidi dari pemerintah dikurangi selama konflik antara Catalunya dengan Spanyol.

Kebijakan pajak di Spanyol telah menyebabkan perbedaan di antara penduduknya terutama di Catalunya yang mengaku sebagai wilayah dengan jumlah kewajiban pajak terbesar namun mendapat bantuan paling sedikit. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Spanyol dan Catalunya pun cukup berbeda, keduanya sangat kuat dengan data dan kepentingannya masing-masing. Masalah ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan ekonomi di antara wilayah otonom di

Spanyol dimana ada wilayah yang diizinkan untuk mengelola pajak mereka sendiri seperti Basque Country dan Navarra, namun ada yang juga yang tidak diizinkan seperti Catalunya. Ketidakadilan ekonomi ini menjadi salah satu alasan Catalunya berupaya memisahkan diri dari Spanyol. Ketidakstabilan ekonomi di Spanyol tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pajaknya, namun juga karena krisis ekonomi yang melanda negara tersebut sejak tahun 2008.

3. Perubahan UU Otonomi Catalunya 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol tahun 2010

Draft baru UU Otonomi Catalunya merubah UU Otonomi tahun 1978 dengan cukup signifikan. Dari 57 artikel yang ada diubah dan ditambahkan menjadi 227 artikel yang berisi antara lain Artikel 1 Bangsa Catalan yang menjelaskan Catalunya sebagai sebuah bangsa, Artikel 204 Kekuatan Finansial yang menjelaskan Catalunya berhak mengatur pajaknya sendiri, dan Artikel 205 Agensi Perpajakan Catalunya yang menjelaskan pembentukan Agensi Perpajakan yang nantinya akan bertugas untuk mengelola pajak Catalunya. Draft tersebut diserahkan ke Parlemen Spanyol atas kesepakatan seluruh anggota Parlemen Catalunya kecuali dari partai *Partido Popular*. Draft yang dibuat tahun 2005 ini selesai dianalisis dan disahkan oleh parlemen Spanyol pada 10 Mei 2006.

Partido Popular mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi Spanyol pada 19 Juli 2006 dengan membawa 411 lembar laporan yang mereka buat untuk menentang hampir setiap aspek di dalam UU tersebut. Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan banding *Partido Popular* dan menghabiskan waktu selama empat tahun untuk menganalisis UU Otonomi Catalunya tahun 2006. Pada 28 Juni 2010 MK Spanyol mengeluarkan Surat Keputusan No. 31/2010 terdiri dari 55 lembar pembahasan UU Otonomi Catalunya yang diamademen dan diinterpretasikan kembali.

Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa UU Otonomi tidak bisa membatasi Konstitusi Spanyol sehingga seharusnya UU Otonomi mengikuti apa yang telah ada di dalam Konstitusi. Keputusan ini pun masih dipertanyakan keabsahannya karena masa jabatan 3 anggota dari 12 anggota MK yang bertugas telah selesai, satu anggota meninggal dunia dan parlemen Spanyol tidak pernah menunjuk penerusnya.

Upaya Catalunya yang awalnya hanya untuk meraih hak otonomi yang lebih besar dan lebih adil menurut mereka berubah menjadi upaya untuk memerdekakan diri dari Spanyol. Pilihan untuk memisahkan diri dari Spanyol akhirnya ditanggapi serius oleh penduduk Catalunya, ditunjukkan dengan respon penduduk yang datang dengan cukup cepat. Pada tanggal 10 Juli 2010, hanya berselang kurang lebih satu bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan MK tersebut, penduduk Catalunya telah mengadakan aksi demonstrasi menentang tindakan MK Spanyol dan menyuarakan pemisahan diri secara masif.

Perubahan UU Otonom Catalunya ini juga menjadi momentum yang tepat bagi penduduk di sana untuk menyuarakan kembali pemisahan diri dari Spanyol setelah pada tahun 1979 berdamai dengan Spanyol dan sepakat untuk bergabung kembali.

Perubahan UU Otonomi tersebut dilihat sebagai bentuk kegagalan Spanyol dalam menyelenggarakan otonomi di Catalunya. Tuntutan hak otonomi yang lebih luas dari Catalunya yang tertuang dalam UU Otonomi 2006 tidak sepenuhnya dikabulkan oleh MK Spanyol akibat pengaduan yang dilakukan oleh partai *Partido Popular* yang telah sejak lama tidak mendukung gerakan nasionalis Catalunya dan selalu menjadi partai minoritas di parlemen wilayah otonom tersebut.

Sejak diubahnya UU Otonomi Catalunya tahun 2010, Catalunya mengalami krisis yang masih berlanjut hingga tahun 2018. Amandemen ini merupakan alasan utama Catalunya kembali berupaya memisahkan diri dari Spanyol. Selama kurun waktu delapan tahun Catalunya telah mengadakan enam kali demonstrasi kemerdekaan di Barcelona dan dua kali Referendum Kemerdekaan pada tahun 2014 dan 2017. Langkah yang diambil Catalunya ini juga yang menyebabkan wilayah otonom tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat selama tujuh bulan setelah jabatan Presiden Carles Puigdemont dicabut. Spanyol dengan tegas menolak hasil referendum di Barcelona dan Catalunya hingga tahun 2018 masih menjadi bagian dari Spanyol dengan hak otonomi yang justru semakin terbatas.

Kesimpulan

Perubahan UU Otonomi Catalunya 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol tahun 2010 menjadi alasan utama kembali bangkitnya upaya pemisahan dari Spanyol yang telah meredam sejak tahun 1931. Didukung dengan adanya nasionalisme Catalan yang kuat dan ketidakadilan ekonomi yang Catalunya rasakan akibat kebijakan pajak Spanyol. Meskipun beberapa kali gagal memisahkan diri dari Spanyol, hal ini tidak mengurungkan niat Catalunya untuk kembali berupaya memisahkan diri dan tetap mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 2017. Deklarasi ini juga mendapat penolakan dari pemerintah Spanyol sehingga Catalunya saat ini tetap menjadi bagian dari negara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Anderson, Glen, 2013. “*Secession In International Law : What Are We Talking About?*” Jurnal Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Vol. 35 No. 3

Bookman, Milica. 1993. “*The Economics of Secession*”. Basingstoke : Inggris.

Pavkovi, Aleksander & Radan, Peter. 2011. “*The Ashgate Research to Companion Secession*”. MPG Group Books : Inggris

Rizky Abdillah Isma. 2015 “*Penolakan Spanyol Dalam Referendum Kemerdekaan Catalunya Tahun 2014*”. Jurnal Mahasiswa Universitas Mulawarman, Vol. 3, No. 3

Sorens, Jason. 2015. “*Secessionism : Identity, Interest, and Strategy*”. McGill Queen’s University Press : Amerika Serikat

Internet

A Look at What Might Happen If Catalonia Goes It Alone

<http://www.businessinsider.com/ap-a-look-at-what-might-happen-if-catalonia-goes-it-alone-2017-10>

Autonomous Communities of Spain GDP,

<https://countryeconomy.com/gdp/spain-autonomous-communities>

Catalonia : Generalitat de Catalunya,

<http://web.gencat.cat/en/temes/catalunya/>

Catalonia has transferred 8% of its GDP every year since 1986 for services and investments in the rest of Spain,

<http://www.catalannews.com/politics/item/catalonia-has-transferred-8-of-its-gdp-every-year-since-1986-for-services-and-investments-in-the-rest-of-spain>

Catalan Independence Rally Brings Barcelona to A Standstill,

<https://www.theguardian.com/world/2012/sep/11/catalan-independence-rally-barcelona>

Profil Negara Spanyol,

<https://www.kemlu.go.id/madrid/Ic/Pages/Spanyol.aspx>

Here's How Bad Economically a Spain-Catalonia Split Could Really Be,

<https://www.cnbc.com/2017/09/21/heres-how-bad-economically-a-spain-catalonia-split-could-really-be>